BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab kurator dalam pengurusan harta pailit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU kurator harus bertanggungjawab untuk mengurus dan mengawasi pengelolaan harta pailit. Namun demikian menurut Pasal 72 UUK dan PKPU tanggung jawab kurator terbatas pada kerugian bagi harta pailit. Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan teori tanggung jawab berdasaskan kesalahan
2. Tanggung jawab kurator dalam kasus kepailitan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang tidak memasukkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai kreditor diselesaikan melalui Putusan Renvoi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn. Dalam kasus ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan renvoi dikarenakan tidak dimasukkan sebagai kreditor, padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan kreditor yang mempunyai jumlah piutang terbesar sejumlah Rp191.803.261.700,00 (seratus

sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Dalam putusan renvoi ini, kurator diperintahkan untuk memasukkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai kreditor namun, bukan sebagai kreditor preferen melainkan kreditor konkuren.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, adapun saran yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab kurator dalam pengurusan harta pailit sebaiknya diperluas, sehingga tidak hanya terbatas pada tanggung jawab kerugian bagi harta pailit. Melainkan, kerugian yang dialami oleh para pihak, misalnya kerugian atas tidak dimasukkannya kreditor tertentu sebagai salah satu kreditor.
2. Kurator perlu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab. Hal ini dikarenakan kurator memiliki peran penting dalam pengurusan pemberesan harta pailit. Pada kasus kepailitan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, bagaimana mungkin seorang kurator dapat mengabaikan salah satu kreditor yang memiliki jumlah piutang yang paling tinggi. Meskipun pada akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimasukkan sebagai kreditor melalui putusan renvoi.